

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelum ini, selanjutnya penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kepala SD Negeri 3 Mangkubumi dalam hal perencanaan telah melaksanakan perannya dengan membuat rencana kegiatan setiap tahun ajaran. selain itu kepala sekolah selalu menyadarkan semua sumber daya manusia sekolah agar selalu berupaya merencanakan program yang bermanfaat, baik itu yang berupa fisik bangunan maupun non fisik misal dalam mendesain pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Sehingga dengan pandangan positif atau luas kepala sekolah, terhadap pendidikan inklusi sangat mempengaruhi pada kesuksesan proses pembelajaran dengan setting inklusi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil secara tepat.
2. Kepala SD Negeri 3 Mangkubumi dalam hal pelaksanaan telah melaksanakan perannya dengan baik dengan bisa mengimplementasikan program tersebut di pelaksanaan, diiringi juga dengan kepala sekolah selalu memberikan dorongan, semangat serta motivasi kepada guru khususnya. Serta kepala sekolah mengikutsertakan guru kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diklat dan KKG yaitu kegiatan pembinaan dan pengarahan yang diagendakan oleh pihak SD Negeri 3 Mangkubumi
3. Kompetensi manajerial Kepala Sekolah model situasional dalam tahap evaluasi terkait kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru yang diungkapkan oleh Kepala SDN 3 Mangkubumi adanya supervisi administrasi dalam bentuk supervisi pada guru bagaimana kemampuan guru mengatur pembelajaran dan kemampuan mengajar. Selain itu terkait penyempurnaan visi misi di sekolah dilaksanakan setiap empat tahun sekali dengan mengacu pada keunikan sekolah tersebut.

5.2 Implikasi

Kompetensi manajerial kepala sekolah model kepemimpinan situasional di SDN 3 Mangkubumi belum diterapkan secara optimal dalam menunjang pendidikan inklusi sehingga hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi manajerialnya.

Pertama, kurangnya pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pendidik di satuan pendidikan dan masyarakat di sekelilingnya, menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusif tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, melainkan terjadi di kalangan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagian besar pengelola pendidikan di tingkat kabupaten atau kota belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. Ketidakjelasan pengelolaan pendidikan inklusif menjadi bukti kurangnya pemahaman pengelola pendidikan inklusif di daerah. Hal ini menyebabkan perkembangan pendidikan inklusif belum menunjukkan perkembangan yang berarti.

Kedua, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Ciamis sangat beragam. Pemerintah daerah memandang bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan kebijakan pemerintah pusat, ketidakjelasan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan terbatasnya kontribusi pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak maksimal. Guru tidak memahami bagaimana mengelola kelas yang melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelasnya. Peran guru di sekolah inklusif tidak berbeda dengan peran guru-guru lainnya di sekolah reguler. Penanganan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini disebabkan karena sekolah inklusif adalah sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia sama dengan sarana dan prasarana di sekolah umum lainnya. Selain itu Kepala

Dina Mayasari, 2023

ANALISIS KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH MODEL KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DI
SEKOLAH DASAR INKLUSI SD NEGERI 3 MANGKUBUMI KABUPATEN CIAMIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sekolah kesulitan untuk mendapatkan guru pembimbing khusus yang diperlukan untuk mengelola pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang inklusif. Lemahnya sumber pembiayaan di sekolah inklusif juga menyebabkan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tidak maksimal.

Ketiga, program pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Penggunaan kurikulum umum di kelas inklusif menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kurikulum yang digunakan. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah belum sepenuhnya mencerminkan proses pembelajaran yang bersifat individual. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas inklusif tidak berbeda dengan kelas reguler. Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif menyebabkan beban guru-guru di sekolah inklusif memiliki tugas yang lebih berat. Ketidakterdapatnya guru pembimbing khusus di sekolah inklusif menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapat layanan pendidikan yang semestinya. Sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas yang berlaku di sekolah inklusif sangat beragam. Di sekolah inklusif yang menggunakan sistem evaluasi bagi ABK sama dengan yang diberikan pada peserta didik reguler, maka dapat dipastikan banyak ABK yang tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan. Hal yang sama pada saat kenaikan kelas, sekolah inklusif yang menggunakan sistem kenaikan berdasarkan mental age, maka pada sekolah tersebut dipastikan banyak ABK yang tidak naik kelas.

Keempat, ketidakjelasan sistem dukungan terhadap pendidikan inklusif menyebabkan pengembangan pendidikan inklusif menjadi lamban. Sejak digulirkan pada tahun 2003 sampai saat ini, pengembangan pendidikan inklusif tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kurangnya dukungan dari berbagai Pemerintah Daerah menyebabkan lemahnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap sekolah inklusif. Sekolah inklusif tidak mempunyai arah yang jelas bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa melakukan peningkatan kompetensi manajerial yang dimilikinya secara terus

menerus dengan cara mengikuti workshop, pelatihan, seminar-seminar dan lain-lain, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

5.3 Rekomendasi

Berkaitan dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang membawahi SD di Kabupaten Ciamis hendaknya tetap melakukan pembenahan sistem pembinaan kepala sekolah yang lebih baik untuk menjamin dihasilkannya kualitas terbaik kepala sekolah. Kepala sekolah memerlukan kompetensi manajerial yang tinggi, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan kepala sekolah hendaknya lebih berorientasi pada pembentukan dan pemberdayaan kemampuan manajerial kepala sekolah yang profesional, lingkungan kehidupan pendidikan, dinamika adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan, pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual, komitmen, serta pengembangan dedikasi kependidikan.

2. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai pengelola dan pemimpin sekolah diharapkan dapat mengimplementasikan kompetensi manajerial kepala sekolah model kepemimpinan situasional di sekolah.

3. Guru

Agar guru selalu termotivasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan menampilkan proses dan hasil kerja yang dilandasi dengan keikhlasan, kejujuran, kesabaran, keterampilan, rasa tanggung jawab, kecintaan terhadap profesinya dan amanah yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.

4. Peneliti

Saran untuk penelitian lain supaya memperhatikan landasan teori yang sudah ada. Baik grand teory maupun teori yang sudah baku untuk memudahkan pembuatan kisi-kisi instrument, penentuan sampel dan analisis datanya.